

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melalui pertumbuhan jaman perubahan di bidang administrasi serta birokrasi pemerintahan daerah ialah guna mengoptimalkan kualitas daripada pelayanan umum di suatu daerah. Sehingga mampu membuat kekuatan kerja suatu lembaga pemerintahan di daerah masing-masing menjadu efisien serta efektif. Dengan begitu keperluan akan di warga daerah perlu mengoptimalkan pemeliharaan sumber daya pembangunan dalam rangka keperluan rakyat umum. Tersedianya pembaharuan di bidang administrasi juga birokrasi pemerintahan di suatu daerah mampu dilakukan perwujudan melalui 3 hal ialah :

- a) Pemberian kekuatan terhadap ketetapan pemerintahan juga regulasinya.
- b) Implementasi *E- government* (upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik) dan *e-governance*(mekanisme interaksi pemerintah dengan masyarakat)
- c) Kerja sama diantara pemerintahan atau yang dinamakan *Collaborative Governance* dengan tujuan melakukan penguatan di suatu daerah juga daerah yang lain didalam territorial. Selanjutya perubahan yang mensupport keikutsertaan serta kepercayaan umum terhadap pemerintahan daerah lewat rancangan pekerjaan yang transparan, efektif, efisien, responsif serta adanya dukungan akuntabilitas begitu tinggi.

Dengan adanya Otonomi Daerah Tanggal 1 Januari 2001 lewat

undang-undang No.2 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi undang-undang No. 32 Tahun 2004 membahas Pemerintah Daerah Reformasi Aspek Keuangan Negara di Pemerintah maupun Pemerintah Daerah juga berlaku diterbitkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 membahas Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah , kedepannya pebaharuan pemeliharaan *finance* Negara di pemerintahan sebagian ditentukan Undang- undang No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara.

Opini Jones juga pendlebury, akuntansi *finance* ialah : *Financial accounting techniques have traditionally been concerned with the stewardship function, narrowly defined. The financial reports provide a picture of the resources entrusted, how the resources were employed during the year, and in what form the resources are now held. The emphasis has always been on producing verifiable statements of income and expenditure, balance sheets and latterly cash flow.*

Dalam hal ini berarti langkah *finance* akuntan dengan alami sudah memperoleh perhatian dari fungsi layanan yang khusus. Kepercayaan atas gambaran pengkajian diwujudkan oleh suatu laporan keuangan . Sehingga bagaimana pengkajian itu dikerjakan dengan waktu setahun, serta menyerupai bentuk apa, seperti apa pengkajian terjadi sekarang ini. Terdapat suatu penekanan dalam hal ini mendapati pernyataan tentang hasil serta pengeluaran, neraca atau *balance sheet* serta arus kas.

Apabila sistem akuntansi di Indonesia pada level pusat terdapat peraturan oleh Peraturan Menteri Keuangan ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dengan begitu sistem akuntansi pemerintah

di level pemda diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Keuangan Daerah juga disupport oleh Permendagri No.59 tahun 2007 mengenai Pedoman Pemeliharaan Keuangan Daerah ialah pasal 232 dimana memberi suatu aturan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang membahas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menerangkan bilamana pemerintahan membuat sistem akuntansi pemerintah yang berpedoman pada SAP. Pada sistem akuntansi pemerintahan di level pemerintah pusat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan pada SAP di level pemerintahan daerah diaturkan melalui aturan gubernur maupun bupati dengan berlandaskan Peraturan Daerah berdasarkan pemeliharaan *finance* daerah yang mengarah ke Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Report Finance digunakan sebagai sistem untuk entitas dengan ini pemerintahan dituntut supaya bisa memberi tanggung jawab atas kekuatan kerja *financenya* terhadap rakyat umumnya. Data-data maupun informasi daripada *report finance* wajib disampaikan atau disajikan oleh pemerintah.. Melalui SAP menerangkan tentang *report finance* yang Bermutu mencukupi syarat-syarat yang diminta, Signifikan, andal, serta mampu dilakukan suatu perbandingan serta mampu dilakukan untuk pemahaman , Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Hal terpenting dari implementasi suatu akuntansi ketika menyusun suatu *report finance* daerah yakni sejumlah rangkaian berawal dari langkah mengumpulkan suatu data-data, mencatatnya, mengikhtisarkannya, hingga pemberian suatu *report finance*. Didalam melaksanakan suatu pertanggung

jawaban atas anggaran pendapatan juga belanja daerah mampu dilaksanakan dengan manual maupun memakai sistem aplikasi di komputer.

Report Finance diciptakan guna memberikan data-data yang sifatnya masuk akal, andal serta mampu dilakukan pertanggung jawaban secara bersama-sama melalui keadaan *finance* serta semua data – data kegiatan yang pencatatannya dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode dilaporkannya. Demikian berlaku untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana tiap tahun mendapatkan nilai daripada anggota auditor Pemerintah atau disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwujud suatu pendapat atau opini. BPK member suatu pendapat menjadi 4 jenis ialah pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), serta pernyataan penolakan anggota pendapat maupun bukan anggota dari opini atau *disclaimer*. Disaat BPK memberi suatu Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan artian *report finance* yang dilakukan pelaporan oleh orang-orang daerah telah mencukupi suatu kualifikasi yang diminta atau bisa berarti syarat menjadi *report finance* yang penyajiannya masuk di akal, andal, bisa dipegang kpercayaanya serta mampu dilakukan pertanggung jawaban.

Berdasarkan dengan penegasan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan bahwasannya diperlukan upaya kecepatan daripada sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah melalui pemakaian tahap-tahap yang nyata, terprogram serta mencampurkan macam-macam golongan tak hanya dari pemerintahan daerah saja. Hasilnya akan mensupport aparaturnya pemerintahan daerah guna mampu memberikan sajian *report*

finance yang memiliki kualitas.

Supaya bisa menghasilkan *report finance* yang masuk akal, andal, serta kepercayaannya yang bisa dipegang, pemda wajib memiliki keandalan pada sistem akuntansinya. Adanya sistem di akuntansi yang tidak kuat mengakibatkan *report finance* yang dihasilkan menjadi tidak andal bahkan tak masuk akal hingga menghasilkan dampak dalam suatu kebijakan. Pada sekarang ini SAP daerah kebanyakan tergolong lemah, ungkap (Mardiasmo, 2006).

Laporan Keuangan harus berdasarkan dengan undang – undang yang ada,. Bilamana tak tepat dengan undang – undang nya, akan memberi dampak seperti ruginya suatu daerah, penerimaan yang kurang , administrasi yang lemah, bahkan hingga keborosan serta non efisien.

Sejak Tahun 2016 Semua Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Mulai Terbentuk menjadi PPK –BLUD. Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menjadi sangat penting dikarenakan pengelolaan Keuangan BLUD terdapat perbedaan sistem pemeliharaan *finance* Negara pada umumnya. Dalam penjabaran dari peraturan Pemerintah No 92 / PMK.05 / 2005 membahas Rencana Bisnis serta Anggaran (RBA) dan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasar Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dalam BLUD Laporan keuangan sebagaimana tertuang didalam Pasal 36 huruf e dibuat oleh pimpina Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang menggunakan sistem pengelolaan BLUD tepat dengan sistem akuntansi yang diaplikasikan terhadap pemerintahan di daerah. *Report Finance* meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Neraca atau *Balance Sheet*

- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Proses menyusun proyeksi *finance* atau prognosis yang sudah terdapat Pasal 36 huruf e yaitu laporan realisasi anggaran (LRA) juga laporan operasional (LO) yang dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang baru ditetapkan juga akan menggunakan sistem BLUD berdasarkan dengan sistem *planning* serta penganggaran yang diaplikasikan oleh pemerintahan daerah.

Kondisi Puskesmas Sekabupaten Sidoarjo saat ini mempunyai banyak keterbatasan dan kekurangan dalam Hal Sumber Daya Manusia Contohnya dalam Hal Pengelolaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Berasal dari Staf Administrasi yang Notabene Lulusan SMA, Hal ini karena Keterbatasan Tenaga ASN di Pemda Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya kendala tersebut maka pihak Pemda Sidoarjo Membuat SISTEM APLIKASI SIBLUD untuk mempermudah Bendahara Pengeluaran Pembantu Menyajikan Laporan Keuangan per Unit UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, penulis mempunyai keinginan guna melakukan penelitian lebih dalam mengenai " PERANAN SISTEM APLIKASI SIBLUD DALAM PERCEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA UPT PUSKESMAS KABUPATEN SIDOARJO ".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang melatar belakangi suatu permasalahan, dengan begitu penulis mendapatkan perumusan permasalahan pengkajian berikut ini :

1. Bagaimanakah Peranan Sistem Aplikasi SIBLUD dalam Percepatan Laporan Keuangan pada UPT Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pengkajian disini yang menyesuaikan pada identitas permasalahan yang diungkapkan diatas. Dengan begitu tujuan daripada pengkajian ini ialah :

1. Guna mengetahui Bagaimana Peranan Sistem Aplikasi SIBLUD dalam membantu percepatan laporan keuangan yang Digunakan oleh UPT. Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo .

1.4 Manfaat Penelitian

Pengkajian di diingnkan supaya mampu memberi suatu manfaat berikut ini :

1. Aspek Akademis

Pengkajian ini digunakan agar bisa menjadi bahan acuan pustaka ataupun bacaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat mendalami topic yang sama. Penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu kajian teori dan sebagai pembanding studi kasus bagi para akademisi yang akan melakukan analisa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi

pada Instansi ataupun organisasi, untuk kemudian melakukan penilaian apakah pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berjalan dengan baik atau tidak.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengkajian disini dimohon mampu memperbanyak wawasan tentang Sistem Aplikasi SIBLUD dalam membantu percepatan Laporan Keuangan. Dengan adanya Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak signifikan kepada kemajuan di bidang Akuntansi dapat dinikmati. Terkhusus di bidang akuntansi dapat diketahui jika pemakaian teknologi Informasi bisa menolong dalam mengolah data – data maupun pelaporannya, hingga akhirnya bisa memberi hasil yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Penulis mengarapkan supaya hasil daripada pengkajian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bertepatan dengan bahan pertimbangan para peneliti selanjutnya dengan bermaksud guna melaksanakan pengkajian tentang pemanfaatan teknologi informasi akuntansi pada Instansi atau organisasi yang ada Tujuan Penelitian

3. Aspek Praktis

Dalam Praktek Sistem Aplikasi Siblud ini banyak memberikan manfaat bagi instansi terkait , Hal ini dikarenakan Sistem ini sangat praktis dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Peneliti sangat mengharapkan bila pengkajian tersebut mampu memberi pengaruh dampak positif teruntuk UPT. Puskesmas terutama pada daerah Kabupaten Sidoarjo dan dimohonkan hasil pengkajian ini bisa menjadikan suatu bahan analisa , inspeksi serta masukan-masukan

guna mengoptimalkan kekuatan kerja perorangan lewat implementasi sistem informasi akuntansi SIBLUD dengan selalu memperhatikan sumber daya manusia sebagai pemakai serta memberi suatu latihan - latihan tentang sistem diciptakan sehingga membuat suasana lingkungan menjadi kondusif serta teratur supaya tiap individu mampu bersikap disiplin ketika melakukan suatu pekerjaan hingga akhirnya mengakibatkan hasil daripada kekuatan kerja mengalami peningkatan.